

## **KARUT-MARUT PARTAI POLITIK DALAM PENTAS POLITIK DI TINGKAT LOKAL**

**Efriza**

Alumni Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional

Email: [efriza\\_riza@yahoo.com](mailto:efriza_riza@yahoo.com)

### ***Abstract***

*This article discusses the behavior of political parties in elections at the local level that indicates the failure of the party in exercising leadership recruitment. According to the authors, political parties in Indonesia has pursued a policy of pragmatic and ignore the ideology of the party in nominating candidates for regional heads, so that the present is the attitude minus the ethics of political parties, the oligarchs at the local level and the political inheritance electoral impact neglect of elections as the provision of stock of the national leadership. This study found that operation elections became chaotic by the behavior of the party's failure to carry out roles and functions of such recruitment. The theory is applied perspective is a Political Party System and Political Parties, and Nomadism Party; to understand the concept of the behavior of political parties in the political arena local level.*

*Keywords: Pilkada, Nomadisme Partai, Politik Kekerabatan*

### **Pendahuluan**

Riuh rendah perpolitikan tanah air mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengemuka kembali sorotan utamanya adalah Partai Politik (Pарpol). Perkembangan Pарpol di era demokratisasi tingkat lokal ini sangat mengkhawatirkan, pарpol bukan saja telah kehilangan identitas kepartaian, melainkan memainkan strategi politik yang mengabaikan kepentingan masyarakat yaitu nomadisme partai.

Nomadisme bukanlah istilah baru, yang sering kita dengar dengan sebutan seperti: kutu loncat, tidak berkomitmen, minus etika, dan sebagainya. Nomadisme dalam bahasa akademik, dipopulerkan di Indonesia oleh Yasraf Amir Pilliang (2005), nomadisme tentu saja tidak hanya menjangkiti politisi namun pula pарpol sehingga dikenal dengan nomadisme partai. Nomadisme partai adalah pergerakan pарpol yang terus-menerus, pada tingkat citra, slogan, lambang, atau ideologi tanpa pernah mampu mengubah watak, karakter, dan budaya politiknya tersebut. Maksudnya pарpol telah

mengabaikan ideologi sebagai identitas pemersatu dan tujuan perjuangan partai.

Dengan memilih strategi politik ini tentu saja meski diterima sebagai manuver politik, sebagai bagian dari politik, tetapi strategi ini nyatanya merupakan sebuah ironi politik dari terwujudnya absurditas dalam berpolitik, bahkan nomadisme ini merupakan kecenderungan politik secara psikologis yang sedang sakit. Nomadisme partai ini pula secara perlahan namun pasti telah mengikis harapan publik, sebab strategi ini telah menunjukkan potrem buram peran dan fungsi parpol dalam rekrutmen kepemimpinan nasional, kecenderungan munculnya oligarki di tingkat lokal dan terjadinya politik kewarisan atas suatu daerah pemilihan juga tak bisa dielakkan, bahkan berpolitik minus etika sepertinya telah menjadi lakon diri, bukan lagi sekadar hanya untuk meraih kemenangan, dan memperluas dukungan pemilih.

Tulisan ini akan berupaya untuk menjelaskan antara harapan pilkada sebagai awal dari proses penyediaan stock pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas untuk menuju ke kancah politik nasional, namun yang terjadi malah sebaliknya kegagalan parpol dalam menjalankan peran dan fungsi rekrutmen kepemimpinan.

## **Metode Penelitian**

Penulisan dalam penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan (M. Nazir, 2003). Dalam melakukan prosedur studi pustaka bahwa informasi-informasi yang dihimpun dari sumber kepustakaan adalah yang relevan dengan penelitian ini, kemudian diteliti dan dianalisis serta dilakukan pengkajian akan kelemahan atau kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga kebaruan riet dari hasil penelitian dapat dihasilkan.

## **Perkembangan Kepartaian dan Analisis Berdasarkan Konsep Politik**

Parpol adalah sekelompok masyarakat yang diorganisasikan untuk tujuan memenangkan kekuasaan pemerintahan, dan biasanya memperlihatkan satu kepatuhan ideologis (Andrew Heywood, 2013: 427). Namun kebanyakan parpol modern menurut Andrew Heywood masuk dalam kategori dari apa yang oleh Otto Kirchheimer (1966) diistilahkan sebagai *catch all party* atau 'partai tangkap semua.' Ini adalah partai-partai politik yang secara drastis

mengurangi muatan ideologis mereka dalam rangka untuk meraih sebanyak mungkin jumlah pemilih (Andrew Heywood, 2013: 393).

Partai *catch all* ini menurut Otto Kirchheimer bahwa dengan meninggalkan usaha-usaha pengkaderan massa secara intelektual dan moral, parpol beralih ke arena pemilihan umum (Pemilu) dan berusaha menukar efektivitas dan kedalaman sedikit anggota dengan usaha meraih audiens yang lebih luas dan kemenangan dalam pemilu (Ichlasul Amal, 1996: 45).

Pergerakan parpol sebagai partai *catch all*, sejalan dengan tingkah pola parpol dalam strategi politiknya. Seperti telah dijelaskan bahwa nomadisme tidak selalu bersifat negatif tetapi juga dianggap sebagai manuver, dan strategi politik dalam rangka meraih kemenangan politik. Nomadisme tidak saja merupakan kecenderungan politik, akan tetapi sekaligus kecenderungan psikologis, khususnya psikologis politik. Ia hidup di dalam semacam *ruang petualangan politik (nomad political space)*, yang di dalamnya diri, simbol, identitas, dan ideologi menjadi semacam pakaian yang dengan mudah ditukar; yang di dalamnya identitas dapat ditukar dengan sebuah kekuasaan, dan keyakinan (politik, agama, kultur) dapat ditukar dengan sebuah kursi/jabatan.

Nomadisme tidak hanya menjangkiti para politisi tetapi juga parpol. Jika nomadisme yang dilakukan oleh para politisi kita masih menganggap wajar (pro dan kontra), tatkala parpol dianggap sebagai kendaraan politik semata. Tetapi tidak sebaliknya, jika nomadisme terjadi pada parpol. Nomadisme partai menurut Yasraf Amir Piliang adalah pergerakan parpol yang terus-menerus, pada tingkat citra, slogan, lambang, atau ideologi tanpa pernah mampu mengubah watak, karakter, dan budaya politiknya tersebut (Yasraf Amir Piliang, 2005: 158).

Jika nomadisme itu sudah terjadi pada parpol maka yang akan terjadi adalah parpol tidak pernah memiliki ketetapan dan konsistensi pada tingkat keyakinan atau ideologi politik, karena baginya keyakinan dan ideologi hanya sebuah alat atau tempat persinggahan saja untuk merealisasi kepentingan dari parpol tersebut, bukan kepentingan bangsa. Di sini hasrat kepentingan parpol telah mengalahkan kepentingan bangsa yang lebih besar (Yasraf Amir Piliang, 2005: 156).

Nomadisme partai bukanlah simbol kebebasan parpol, sebab pergerakan parpol kecenderungannya adalah berdasarkan ideologinya, tetapi nomadisme cenderung memberikan dampak telah lunturnya ideologi parpol dalam perjalanan institusi partai tersebut, yang semestinya menurut Ramlan Surbakti, bahwa ideologi merupakan hal terpenting bagi parpol, setiap parpol mesti memiliki ideologi yang berfungsi tidak hanya sebagai identitas pemersatu, tetapi juga sebagai tujuan perjuangan parpol. (Ramlan Surbakti, 1992: 115) Lebih tepatnya, nomadisme sebagai kecenderungan psikologis, yang menunjukkan bahwa nomadisme pada tingkat sosial politik tidak dapat

dipisahkan dari apa yang disebut *skizofrenia* pada tingkat psikis yang selama ini cenderung dilihat sebagai kelainan, abnormalitas, dan penyakit psikis. Sehingga, nomadisme partai dapat kita anggap sebagai suatu gerak parpol yang sedang mengalami penyakit psikis berupa kegagalannya dalam menjalankan peran dan fungsinya antara lain seperti dalam menjalankan rekrutmen kepemimpinan nasional (Yasraf Amir Piliang, 2005: 162).

### **Petualangan Partai Dalam Strategi Nomadisme**

Nomadisme partai tampak menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017, ini ditunjukkan oleh geliat parpol seperti Nasdem, Hanura, dan Partai Golkar yang menyatakan dukungannya bagi Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang telah menyatakan diri maju sebagai calon independen.

Dalam Pilkada ada dua jalur resmi yang dijamin dalam demokrasi politik lokal untuk dapat dipilih seseorang atau pasangan calon untuk maju dalam pencalonan eksekutif di tingkat lokal yaitu jalur perseorangan dan jalur parpol. Jalur perseorangan/independen hadir dari dibukanya koreksi bagi rakyat yang ingin mengajukan calon sendiri lantaran parpol dianggap tak mampu menghadirkan figur tepat untuk berkontestasi, dan juga disebabkan citra parpol yang buruk di mata masyarakat akibat tingkah laku korup anggota parpol yang duduk di badan-badan legislatif dan eksekutif pusat dan daerah.

Sehingga demikian, wajar jika sejak awal Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang calon independen didukung oleh parpol. KPU berpegang pada prinsip bahwa calon perseorangan dan calon dari parpol tidak bisa dicampuradukkan. Jika memilih jalur perseorangan dan dalam praktiknya didukung oleh parpol, calon itu tidak boleh mencantumkan dukungan partai tersebut di atas kertas, bahkan dukungan dari ketiga parpol tersebut hanya berlindung dibalik kepopuleran Ahok semata, ini ditunjukkan dari kepastian dukungan ketiga partai itu yang masih dipertanyakan, sebab ketiga parpol yang mengumumkan dukungannya, belum mengeluarkan surat rekomendasi mengusung Ahok dalam Pilkada 2017 ((Parafraza, Koran Tempo, 14 Juni 2016: 11, dan Koran Tempo, 18-19 Juni 2016: 2).

Semakin janggal adalah langkah parpol yang mendukung Ahok tersebut tidak sejalan dengan kebijakan parpol itu di parlemen, sebab *bleid* yang baru direvisi dan disahkan DPR itu, yaitu Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, malah memperberat syarat bagi calon perorangan. Seperti, Pasal 41 dan Pasal 48 yang sangat multitafsir, persoalan pada frasa "dan tercantum dalam DPT sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud," ketentuan ini berpotensi menggerus jumlah dukungan dari kelompok pemilih pemula yang belum terdaftar di DPT, serta tentang batas waktu tiga hari verifikasi faktual calon perorangan dengan metode sensus dan

menemui langsung setiap pendukung calon, yang berpotensi menggerus dukungan karena bisa saja pendukung calon independen tak berada di tempat ketika petugas datang. Tentu saja, perubahan pada undang-undang itu, dibuat hanya untuk menjegal Ahok di Jakarta, sehingga membuat Ahok harus berhitung ulang, namun undang-undang itu dibuat sekaligus menjegal calon-calon independen di seluruh Nusantara, *bleid* itu yang coba di uji materi ke Mahkamah Konstitusi oleh Teman Ahok, kelompok relawan pencalonan independen Basuki Tjahaja Purnama dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 (Parafraza, Koran Tempo, 11-12 Juni 2016: 2, dan Koran Tempo, 18-19 Juni 2016: 2).

Ini menunjukkan sifat pragmatis parpol itu harus dilihat sebagai upaya parpol menutupi diri bahwa tidak memiliki konsistensi program, semestinya parpol dalam mendukung calon harus tetap berpegang teguh pada kesamaan program, ideologis, sebagai kesatuan perjuangan dari partai itu. Langkah ini juga menunjukkan kegagalan parpol dalam menjalankan fungsinya yaitu melakukan rekrutmen pengkaderan. Realitas ini menjadikan partai-partai politik memanfaatkan segala kemungkinan dan kondisi yang memberikan mereka keuntungan dalam dimensi citra maupun materiil, ini semakin kentara dari sepak terjang Partai Nasdem yang mendukung Ahok tanpa syarat, kemudian diikuti oleh Partai Hanura. Bahkan, langkah Partai Golkar mendukung Ahok, yang ditenggarai hanya sebatas karena ingin memenangi pilkada saja, yang didasari oleh kepopuleran Ahok, pilihan ini sebagai akibat belum siapnya konsolidasi partai sesudah konflik yang mendera partai tersebut (<http://jateng.tribunnews.com/2016/05/21/partai-golkar-beri-sinyal-dukung-ahok>).

Langkah Partai Hanura dan Partai Nasdem tersebut sebagai partai gurem dan partai baru tentu disebabkan karena ketiadaan atau minimnya modal sosial sebelum parpol ini lahir dan berkembang. Lemahnya figur dan konsistensi program, menjadikan partai-partai politik ini memanfaatkan segala kemungkinan dan kondisi yang memberikan keuntungan seperti dalam dimensi citra maupun materiil. Gerak politik parpol pun akhirnya mengabaikan pembatasan ideologi, platform dan strategi untuk mengimplementasikan program-programnya (M. Faisal Aminuddin, Moh. Fajar Shodiq Ramadhan, 2015).

Semestinya, partai-partai politik melakukan manuver menjelang pilkada, malah partai-partai politik itu seharusnya mencalonkan kadernya dan mendorong sosialisasi secara terstruktur dan berkala kader-kader yang didorongnya dalam pencalonan, sehingga masyarakat memperoleh banyak calon untuk dipilih dan calon-calon itu perlahan bisa mulai dikenal dan memperoleh tingkat kepopuleran, dan partai-partai politik tidak perlu takut pada kepopuleran calon perseorangan yang memang dijamin dalam demokrasi politik lokal.

Nomadisme partai juga terjadi dalam hubungan jalinan mitra koalisi pasangan calon. Sebagian besar koalisi parpol pengusung gubernur terpilih dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 tidak selaras dengan koalisi parpol di level pemerintah pusat hasil Pilpres 2014. Mulai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) selaku koalisi parpol pendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla yang terdiri dari PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, PAN, PPP, dan PKPI, maupun dengan Koalisi Merah Putih (KMP) selaku parpol oposisi yang terdiri dari partai Gerindra, Golkar, PKS, dan Demokrat.

Kondisi ini sedikit banyak berpengaruh pada efektivitas hubungan pemerintahan pusat dengan daerah kelak. Mengingat, dalam kerangka desentralisasi yang telah membagi urusan pemerintah pusat dengan daerah dan tertuang dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan provinsi akan banyak berhubungan dengan pemerintah pusat dalam pengambilan kebijakan strategis seperti izin eksplorasi hayati, energi, mineral, sampai dengan relasi distribusi anggaran atau transfer pusat ke provinsi. Sehingga, logikanya, jika koalisi pemerintahan provinsi selaras (kongruen) dengan koalisi pemerintahan pusat, maka efektivitas hubungan pemerintahan pusat dan daerah akan terjaga. Sedangkan jika koalisi di level provinsi tidak selaras dengan pemerintahan pusat, hubungan pusat dan daerah yang efektif dan kondusif kemungkinan akan sulit terjalin dengan baik.

Berdasarkan hasil perbandingan koalisi pemerintahan provinsi hasil Pilkada serentak 2015 dengan pemerintahan pusat hasil Pilpres 2014, hanya terdapat dua daerah yakni Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Jambi yang koalisi parpol pendukung pemerintahan terpilih selaras dengan koalisi pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Di Provinsi Sulawesi Utara, PDIP selaku parpol dari presiden Jokowi menjadi satu-satunya parpol pengusung pemerintahan gubernur dan wakil gubernur provinsi terpilih. Di Provinsi Jambi, terdapat tiga parpol yakni PAN, Nasdem, dan PKB yang menjadi anggota koalisi pengusung pemerintahan Jokowi berhasil memenangkan pasangan Zumi Zola dan Fachrori Umar sebagai gubernur dan wakil gubernur Jambi.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Koalisi Pemerintah Pusat dan Provinsi**

Koalisi Pemerintah Pusat		Koalisi Pemerintah Provinsi Partai Koalisi		Keterangan Kongruen
Koalisi Pemerintahan Jokowi-JK	Koalisi Oposisi KMP	Provinsi	Partai Koalisi	
PDIP Nasdem PKB Hanura PKPI PAN PPP	Gerindra Golkar PKS Demokrat	Provinsi Bengkulu	Hanura, PKB	Kongruen
		Provinsi Sumatera Barat	PKS, Gerindra	Kongruen dengan Oposisi
		Provinsi Jambi	Nasdem, PKB, PAN	Kongruen dengan Pemerintah Pusat
		Provinsi Sulawesi Tengah	Gerindra, PAN, PKB, PBB	Tidak Kongruen
		Provinsi Kepulauan Riau	Demokrat, Nasdem, PKB, Gerindra, PPP	Tidak kongruen
		Provinsi Kalimantan Selatan	PDIP, Gerindra, PKS, PAN, Hanura	Tidak kongruen
		Provinsi Sulawesi Utara	PDIP	Kongruen dengan pemerintah pusat

(Sumber: Heroik M. Pratama dan Mahardikka, 2016: 31)

Di lain pihak, keselarasan koalisi parpol di provinsi tidak hanya tercermin pada koalisi pengusung pemerintahan Jokowi semata, melainkan terdapat pula koalisi yang selaras dengan parpol oposisi pemerintahan. Keselarasan tersebut dapat dilihat di Provinsi Sumatera Barat antara partai Gerindra dan PKS yang berhasil menjadikan pasangan Irawan Prayitno dan Nasrul Abit sebagai kepala daerah terpilih. Sedangkan, koalisi di empat daerah lainnya seperti Provinsi Bengkulu, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Kalimantan Selatan cenderung tidak

kongruen dengan koalisi parpol di level pemerintah pusat. Bahkan, kecenderungan berpolitik minus etika atau tidak adanya disiplin kepartaian kemungkinan akan terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017, jika tawaran berkoalisi dari Partai Gerindra sebagai koordinator KMP diterima oleh PDIP sebagai kapten dari partai pendukung pemerintahan (Heroik M. Pratama dan Mahardikka, 2016: 29-32, dan <http://pilkada.liputan6.com/read/2504251/pdip-berkoalisi-dengan-gerindra-ini-keyakinan-ahok>).

### **Efek Negatif dari Nomadisme Partai di Era Demokratisasi Tingkat Lokal**

Kekhawatiran pada kepopuleran Ahok sebagai calon perseorangan yang memang dijamin dalam demokrasi politik lokal. Tidak disemangati oleh Partai-partai politik yang seharusnya dapat melakukan rekrutmen politik para bakal calon kepala daerah dan sosialisasi politik lebih awal sehingga tingkat kepopuleran kandidat itu perlahan-lahan diupayakan bisa mengimbangi kepopuleran Ahok, (Parafraza, <http://news.metrotvnews.com/read/2016/03/14/498206/ahok-dan-tuduhan-deparpolisasi>)

Fenomena menjelang Pilkada DKI 2017 juga telah menunjukkan bahwa partai-partai politik yang semestinya melahirkan calon-calon pemimpin lokal melalui sistem kaderisasi, tetapi kecenderungan menjalankan fungsi itu tidaklah terjadi. PDIP yang awalnya melakukan penjarangan calon kepala daerah yang akan diusungnya ternyata hanya sekadar “lipstik” semata ketika kembali dilakukan upaya mendekati Ahok agar berpindah dari rencana jalur perseorang menjadi *party system*. Yang sekarang sedang terjadi menunjukkan bahwa peluang Pilkada sebagai awal dari proses penyediaan stock pemimpin-pemimpin yang berkualitas untuk menuju ke kancah politik nasional, menjadi tidak lagi greget! (Parafraza, Efriza, 2016: 123-131).

Padahal, sebelumnya penyelenggaraan Pilkada telah terbukti berkorelasi positif dengan dihasilkannya stock pemimpin nasional seperti dengan terpilihnya Jokowi sebagai Presiden yang dianggap merupakan sebuah hasil dari proses keberhasilan penyelenggaraan pilkada tersebut sehingga masyarakat menganggap, menginginkan dan akhirnya memilih Jokowi yang dianggap sosok ideal yang dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik. Pengalamannya selama menjadi kepala daerah di Solo dan Jakarta dengan profilnya yang dipandang bersih dari korupsi dan merakyat merupakan tolok ukur keterpilihan Jokowi. (Parafraza, Paharizal, 2014: 1-7).

Sekarang ini, yang ada ketidakberdayaan parpol dalam melakukan rekrutmen kepemimpinan bahkan malah menciptakan ketidakstabilan di suatu daerah lain. Seperti, partai-partai politik melihat fakta bahwa figur Ahok hanya bisa ditandingi oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, berduyun-duyun partai-partai politik berupaya mengusung figur-figur itu untuk rela melepaskan jabatannya dan



mencoba peruntungan di DKI Jakarta. Beruntung, Ridwan Kamil, Tri Rismaharini, dan Ganjar Pranowo, menolak untuk dicalonkan dalam Pilkada di DKI Jakarta. Jika saja hal sebaliknya, maka ini akan merugikan satu wilayah lainnya, sebab Indonesia memerlukan para pemimpin yang berkomitmen dan bisa menjaga integritas di berbagai daerah-daerah (Parafraza, <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/29/16524771/>. Hany a.Risma. dan.Ridwan.Kamil.yang.Bisa.Saingi.Ahok).

Dengan demikian, tujuan bersama terhadap Indonesia bisa segera tercapai, jika di setiap daerah-daerah bisa dihasilkan pemimpin-pemimpin berkualitas, ini membuktikan bahwa parpol gagal menjalankan fungsi rekrutmennya, jika melihat cara instan yang dipilih yakni mengambil calon-calon yang sedang mengemban amanat dari daerahnya hanya untuk elektabilitas semata dan kepentingan pragmatis parpol saja tetapi mengabaikan amanat rakyat di daerah tersebut yang telah memilih pemimpin tersebut, hal ini juga sejalan dengan upaya partai meski gagal dalam menyusupkan pasal agar calon gubernur, bupati, dan walikota berikut wakilnya yang berasal dari DPR dan DPRD tidak termasuk yang mengundurkan diri dari jabatannya. (Parafraza, [http://regional.kompas.com/read/2016/03/02/11062421/Gaya.Ridwan.Kamil.Risma.dan.Ganjar.Pranowo.Menolak.DKI.1?\\_page=all](http://regional.kompas.com/read/2016/03/02/11062421/Gaya.Ridwan.Kamil.Risma.dan.Ganjar.Pranowo.Menolak.DKI.1?_page=all), dan Koran Tempo, 11-12 Juni 2016: 2).

Nomadisme partai juga kentara dari berlangsungnya politik kekerabatan dan dinasti atau keluarga politik yang semakin tampak menguat di tingkat lokal (Parafraza, hasil penelitian: Efriza dan Susi Dahlia, 2016: 245-252). Ini tidak terlepas dari buruknya proses rekrutmen politik yang dilakukan parpol dalam pemilu dan khususnya dalam pilkada. Partai-partai politik lalu menyandarkan pada tokoh-tokoh pesohor atau yang memiliki uang besar untuk politik pencitraannya, parpol juga semakin tergiring untuk mendukung kandidat-kandidat yang diajukan oleh para petahana (*incumbent*) yang masih memiliki *political resources* dan otoritas formal atau yang sudah tidak mungkin lagi maju berkompetisi karena aturan pembatasan masa jabatan. Ikatan kekerabatan dengan para *incumbent* atau tokoh sentral parpol jelas saja membuat nepotisme menjadi lebih menonjol dibandingkan dengan proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh parpol (Nico Harjanto, 2011, 152-153).

Faisal Rahmadi, mencoba menguraikan politik dinasti dengan mengembangkan dari sumber *kompas.com* menjadi dua bagian yaitu politik dinasti vertikal dan politik dinasti horizontal sebagai berikut ([http://www.academia.edu/18974427/pola\\_politik\\_kekerabatan\\_sebagai\\_faktor\\_terbentuknya\\_dinasti\\_politik](http://www.academia.edu/18974427/pola_politik_kekerabatan_sebagai_faktor_terbentuknya_dinasti_politik)).

**Tabel 1.2**  
**Politik Dinasti Vertikal**

No.	Daerah	Keterangan
1	Indramayu	Bupati Indramayu Anna Sophanah adalah istri dari bupati Indramayu sebelumnya, Irianto MS Syafrudin.
2	Bekasi	Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin adalah menantu dari Bupati Bekasi sebelumnya, Saleh Munaf.
3	Tana Toraja	Bupati Tana Toraja, Adelheid Sosang adalah istri dari Bupati Tana Toraja sebelumnya, Juhanis Amping Situru.
4	Tangerang	Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar adalah anak dari mantan Bupati Tangerang sebelumnya, Ismet Iskandar.
5	Bangkalan	Bupati Bangkalan Mohammad Makmun Ibnu Fuad adalah anak dari mantan bupati Bangkalan sebelumnya, Fuad Amin.
6	Kutai Kertanegara	Bupati Kukar, Rita Widyasari adalah anak dari mantan bupati Kukar sebelumnya, Syaukani Hasan Rais.
7	Maluku Tengah	Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua adalah kakak dari mantan bupati Maluku Tengah sebelumnya Abdullah Tuasika.
8	Bantul	Bupati Bantul Sri Suryawidati adalah istri dari mantan bupati Bantul sebelumnya Idham Samawi.
9	Kendal	Bupati Kendal Widya Kandi Susanti, adalah istri dari bupati Kendal Sebelumnya, Hendri Boedoro.
10	Kab. Bandung	Bupati Bandung, Dadang Naser adalah menantu dari bupati Bandung sebelumnya, Obar Sobarna.
11	Cimahi	Walikota Cimahi, Ati Suhari adalah istri dari mantan walikota Cimahi sebelumnya Itoc Tochija.
12	Probolinggo	Walikota Probolinggo Puput Tantriana adalah istri dari mantan walikota Probolinggo sebelumnya, Hasan Aminudin.
13	Kediri	Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno, adalah istri dari bupati Kediri sebelumnya Sutrisno.
14	Barru	Bupati Barru, Andi Idris Syukur, adalah anak dari Bupati baru sebelumnya
15	Tabanan	Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti adalah anak dari mantan bupati Tabanan sebelumnya, Adi Wiryatama.

**Tabel 1.3**  
**Politik Dinasti Horizontal**

No.	Daerah	Keterangan
1	Banten	Gubernur Banten, Atut Chosiyah merupakan: Kakak kandung Wakil Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah Kakak tiri Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman Kakak ipar Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany Ibu Tiri Wakil Bupati Pandeglang, Heryani
2	Lampung	Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP merupakan: Ayah dari Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza Ayah dari Wakil Bupati Pringsewu, Handiytya Narapati
3	Sulawesi Selatan	Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, merupakan: Kakak Kandung Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo
4	Jambi	Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin, merupakan: Orang tua kandung dari Zumi Zola Zulkifli, Bupati Tanjung Jabung Timur, Jambi Mertua dari Wakil Bupati Muaro Jambi, Kemas Muhammad
5	Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah	Wali Kota Waringin Timur, Supian Hadi, merupakan: Menantu Bupati Seruyan, Darwan Ali
6	Sulawesi Utara	Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang, merupakan: Ayah dari Wakil Bupati Minahasa Ivan SJ. Sarundajang
7	Takalar	Wakil Bupati Takalar, M. Natsir Ibrahim, merupakan: Anak mantan Bupati Takalar, Ibrahim Rewa
8	Padang Lawas Utara, Sumatera Utara	Bupati Padang Lawas Utara, Bachrum Harapan, merupakan: Orang tua kandung dari Wali Kota Padang Sidempuan, Andar Amin Harapan.

(Sumber: Faisal Rusmadi, dalam [http://www.academia.edu/18974427/pola\\_politik\\_kekerabatan\\_sebagai\\_faktor\\_terbentuknya\\_dinasti\\_politik](http://www.academia.edu/18974427/pola_politik_kekerabatan_sebagai_faktor_terbentuknya_dinasti_politik))

Dalam Pilkada Serentak 2015 ini, dari 264 daerah yang melangsungkan pilkada serentak tahap pertama di tahun 2015, 151 daerah di antaranya diikuti oleh calon kepala daerah atau wakil kepala daerah petahana. Atau dari 82,5% calon petahana yang ikut dalam Pilkada Serentak 2015, Petahana masih mendominasi sekitar 63,92 persen berhasil memenangkan

Pilkada, berdasarkan survei Skala Survei Indonesia (SSI) mengenai "Hegemoni Petahana dan Masa Depan Demokrasi Kita" di Jakarta, Selasa 26 Januari 2016 (<http://www.rmol.co/read/2016/01/26/233527/1/Mayoritas-Pilkada-Dimenangi-Petahana,-Politik-Dinasti-Terus-Lestari>).

Ini membuktikan bahwa dengan kemenangan petahana menunjukkan adanya hegemoni petahana dengan politik dinasti yang masih tetap berlangsung hingga saat ini, menurut Nico Harjanto, dorongan untuk memenangi pilkada, menyebabkan para pengurus parpol merelakan parpolnya dibajak elite-elite lokal ini dan konsekuensinya mereka harus menutup peluang bagi kader-kader potensialnya untuk bertarung dalam pilkada (Nico Harjanto, 2011: 156).

Implikasi dari realitas semacam itu adalah, pilkada secara langsung pada akhirnya berproses secara elitis, tentu saja menyebabkan kekuasaan yang terbangun oleh pemilihan secara langsung itu bisa saja bukan untuk rakyat melainkan untuk kekuatan politik elitis tersebut. Jadi, memang benar, para pemilih bisa secara langsung memilih kepala daerah, tetapi proses pemilihan calon kepala daerah yang menggunakan mekanisme 'party system' prosesnya tidak lepas dari proses elitis (patronase).

Bahaya dari politik kekerabatan adalah kasus dinasti politik Banten merupakan contoh utama dinasti politik yang dirancang *by design* oleh para kerabatnya untuk terjun ke dunia politik. Dinasti politik Banten telah berdiri kokoh seiring dengan usia Provinsi Banten sehingga jaringan kekuasaan telah tersebar kuat di pemerintahan (Wasisto Raharjo Djati, 2013).

Hadirnya dinasti politik di Banten, tak bisa dilepaskan dari telah digenggamnya penguasaan kekuasaan di Banten, ketika sebetulnya penguasaan elite yang lama hadirnya dan meluas misal dengan beberapa keluarga memonopoli kekuasaan politik. Hal ini dibuktikan dengan desain kekuasaan Atut yang ingin disempurnakan melalui upaya memenangkan Bupati Lebak Amir Hamzah di Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya malah membongkar kasus penyuaipan yang melibatkan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi dan jaringan dari dinasti di Banten. Tak dimungkiri Bupati Lebak itu yang merupakan proksi dinasti Atut di Lebak dalam rangka desain kekuasaan Atut makin sempurna di Banten (Burhanuddin Muhtadi, 2013).

**Tabel 1.4**  
**Dinasti Politik Gubernur Ratu Atut Chosiyah**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Hikmat Tomet (Suami)	Anggota DPR 2009-2014
Andika Hazrumy (Anak Pertama)	Anggota DPD 2009-2014
Ade Rossi Chaerunnisa (Istri Andika Harzrumy)	Wakil Ketua DPRD Kota Serang
Tb Khaerul Zaman (adik Atut)	Wakil Walikota Serang
Ratna Komalasari (ibu tiri)	Anggota DPRD Kota Serang 2009-2014
Ratu Tatu Chasanah (adik Atut)	Wakil Bupati Serang
Heryani (Ibu Tiri Atut)	Wakil Bupati Pandeglang
Airin Rachmi Diany (Adik Ipar Atut)	Walikota Tangerang Selatan
Aden Abdul Khalig (Adik Ipar Atut)	Anggota DPRD Banten
Tb Haerul Jaman (Kakak Tiri Atut)	Walikota Serang

(Sumber: *Media Indonesia*, 14 Oktober 2013, h. 4)

Kasus dinasti Banten ini menunjukkan bahwa keinginan melestarikan bahkan memperluas cakupan daerah, maka dilakukan upaya menciptakan pos-pos baru atas prakarsa sendiri, seperti terpilihnya Airin di wilayah hasil pemekaran Tangerang yaitu daerah Tangerang Selatan, maupun terbongkarnya kasus penyuapan untuk memenangkan Bupati Lebak Amir Hamzah di Mahkamah Konstitusi. Sehingga, timbullah dalam diri mereka kecenderungan untuk menyisihkan diri guna membentuk semacam kartelisasi kekuasaan, dalam menjalankan kekuasaan berdasarkan kemauan mereka sendiri.

Pada akhirnya, pemilihan calon hampir selalu tergantung dari suatu klik kecil yang terdiri atas pemimpin-pemimpin lokal dan para pembantunya yang menyarankan nama-nama yang cakap kepada utamanya parpolnya. Dalam banyak hal maka daerah pemilihan yang berhasil dikuasainya tersebut itu dianggap sebagai milik keluarga, seperti terpilihnya Ratu Tatu Chasanah (adik Atut) sebagai Ketua DPD Partai Golkar. Akhirnya, kemenangan-kemenangan dari dinasti politik tetap berjaya di Pilkada Serentak 2015 seperti Ratu Tatu kembali terpilih begitu juga di Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, bahkan terjadi perluasan dinasti politik Ratu Atut yaitu di Kabupaten Pandeglang, Tanto Warsono Arban, menantu Ratu Atut berhasil terpilih ([http://www.beritajatim.com/politik/pemerintahan/244455/tiga\\_dinasti\\_ratu\\_atut\\_bertarung\\_di\\_pilkada\\_serentak.html](http://www.beritajatim.com/politik/pemerintahan/244455/tiga_dinasti_ratu_atut_bertarung_di_pilkada_serentak.html)). Proses ini menunjukkan, yang selama ini tidak terungkap dari berbagai penelitian

sebelumnya bahwa klik-klik kecil melalui dinasti politiknya ingin menjalankan politik kewarisan di daerah yang berhasil dikuasainya dengan telah menancamkan kuku-kukunya di tubuh partai Golkar, parpol menjadi lemah posisi tawar-menawarnya dengan mereka ini karena jelasnya peluang kemenangan mereka dibandingkan kader-kader lainnya, ini ditenggarai dari perilaku sekaligus pernyataan Ratu Tatu bahwa keluarganya akan selalu mengikuti kebijakan Partai Golkar. “Sebagai Ketua DPD Golkar Banten, saya juga ditugaskan oleh DPP untuk memenangkan semua pilkada yang digelar di Banten” (<https://m.tempo.co/read/news/2015/12/10/304726489/pilkada-serentak-dinasti-atut-masih-kuasai-banten>)

## **Simpulan**

Langkah dan upaya parpol selama penyelenggaraan Pilkada dan menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukkan bahwa parpol bukan saja gagal dalam menjalankan fungsi rekrutmennya, tetapi juga menunjukkan bahwa nomadisme partai telah menggiring ke arah semacam imoralisme politik, yaitu wacana politik yang dibangun oleh sikap tanpa rasa malu dan etika oleh permainan moralitas, oleh wajah politik yang berlandaskan hasrat dan kehendak kuasa tak terkendali, yang di dalamnya tidak ada kepedulian terhadap upaya membangun demokrasi, menciptakan efektivitas hubungan pemerintahan pusat dan daerah, bahkan yang tak kalah penting parpol sebagai institusi demokrasi telah mengabaikan peran dan fungsinya sebagai tempat dihasilkannya calon-calon pemimpin nasional yang terbaik, ini juga menunjukkan bahwa nomadisme partai telah menunjukkan kepada kita bahwa gerak partai-partai politik saat ini sedang mengalami penyakit psikis (Parafraza, Yasraf Amir Piliang, 2005: 156).

Peluang Pilkada sebagai awal dari proses penyediaan stock pemimpin-pemimpin yang berkualitas untuk menuju ke kancah politik nasional, juga menunjukkan tidak berjalan dari lemahnya peran dan fungsi parpol menjalankan fungsi rekrutmen, seperti munculnya politik kekerabatan. Politik kekerabatan semakin menunjukkan bahwa parpol telah gagal dalam perannya pada proses saluran kepemimpinan di daerah-daerah. Parpol lebih mengedepankan aspek kemenangan pemilu, sehingga mengabaikan proses kaderisasi, akhirnya parpol memainkan politik yang sarat pragmatisme yakni nepotisme menjadi begitu menonjol.

Tentu saja, hadirnya kesempatan politik kekerabatan tidak bisa dilepaskan dari sikap parpol yang tidak lagi mementingkan regenerasi kepemimpinan, malah membiarkan terjadinya dinasti-dinasti politik di daerah-daerah, dampak dari ini tentu saja ranah perpolitikan menjadi tidak kondusif oleh adanya segelintir elite dari beberapa keluarga, klan, atau dinasti politik yang kuat di wilayah-wilayah tertentu, menutup wilayah kekuasaannya,

sehingga daerah pemilihan dianggap sebagai milik keluarga, dampaknya adalah sangat sulit untuk mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan maupun proses demokrasi yang sehat dan substansial. Bahkan, sejak tahun 1984, Robert Michels, menyatakan bahwa dalam penunjukkan calon-calon untuk pemilihan, kita menemukan juga suatu gejala oligarki yang gawat yaitu nepotisme, inilah yang sedang terjadi dari berlangsungnya politik kekerabatan di daerah-daerah, dampak luasnya adalah ingin mewujudkan politik kewarisan berdasarkan dinasti politik tersebut (Parafrasa, Robert Michels, 1984: 118-119).

Disamping itu, politik kekerabatan dan nomadisme partai menunjukkan bukan saja terciptanya oligarki partai, tetapi juga menunjukkan kepertaian modern sebagai partai *catch all* dengan berbagai strategi politiknya itu telah mengabaikan ideologi sebagai alat pemersatu dan perjuangan partai, dengan meninggalkan usaha-usaha pengkaderan massa secara intelektual dan moral, parpol beralih ke arena Pemilu dan berusaha menukar efektivitas dan kedalaman sedikit anggota dengan usaha meraih audiens yang lebih luas dan kemenangan dalam pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amal, Ichlasul, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik* (Edisi Revisi), Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga, 1996.
- Heywood, Andrew, *Politik (Edisi Keempat)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Michels, Robert, *Partai Politik Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi, Jakarta: Rajawali, 1984.*
- Nazir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Paharizal, Jokowi (Calon) *Presiden Blusukan*, Yogyakarta: Cakrawala, 2014.
- Piliang, Yasraf Amir, *Transpolitika: Dinamika Politik di Dalam Era Virtualitas*, Yogyakarta: Jala Sutra, 2005.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992.

### B. Sumber lain

- Aminuddin, M. Faishal, dan Shodiq Ramadlan, Moh. Fadjar, *Match All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009*, Jurnal Politik, Vol. 1, No. 1, Agustus 2015, dalam <http://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/article/view/9> , (diakses 23 Mei 2016).
- Dalimunthe, Ihsan, Mayoritas Pilkada Dimenangi Petahana, Politik Dinasti Terus Lestari dalam <http://www.rmol.co/read/2016/01/26/233527/1/Mayoritas-Pilkada-Dimenangi-Petahana,-Politik-Dinasti-Terus-Lestari> (diakses 30 Mei 2016).
- Efriza, Pilkada DKI 2017: *Nomadisme Partai dan Kegagalan Partai Menjalankan Fungsi Rekrutmen*, dalam *Prosiding Seminar Nasional STIP-AN Ke-12 Tahun 2016, Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Governance Pada Era Otonomi*, Kamis 02 Juni 2016.



-----, dan Dahlia, Susi, *Politik Kekerabatan dan Perkembangan Partai Politik Kedepan*, dalam Prosiding Seminar Nasional STIP-AN Ke-12 Tahun 2016, Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Governance Pada Era Otonomi, Kamis 02 Juni 2016.

Harjanto, Nico, *Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia*, dalam Analisis CSIS, Politik Kekerabatan di Indonesia, Vol. 40, No. 2, Juni 2011.

Ikhsan Darmawan, *Berpolitik Minus Etika*, dalam *Koran Tempo*, 14 Juni 2016.

Ikrar Nusa Bhakti, *Ahok dan Tuduhan Deparpolisasi*, dalam <http://news.metrotvnews.com/read/2016/03/14/498206/ahok-dan-tuduhan-deparpolisasi>, (diakses tanggal 23 Mei 2016).

Kompas.com, Gaya Ridwan Kamil, Risma, dan Ganjar Pranowo Menolak DKI 1, dalam <http://regional.kompas.com/read/2016/03/02/11062421/Gaya.Ridwan.Kamil.Risma.dan.Ganjar.Pranowo.Menolak.DKI.1?page=all>, (diakses tanggal 23 Mei 2016).

Kompas.com, Hanya Risma dan Ridwal Kamil yang Bisa Saingi Ahok, dalam <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/29/16524771/.Hanya.a.Risma.dan.Ridwan.Kamil.yang.Bisa.Saingi.Ahok>, (diakses tanggal 23 Mei 2016).

Liputan6.com, PDIP Berkoalisi dengan Gerindra? Ini Keyakinan Ahok, dalam <http://pilkada.liputan6.com/read/2504251/pdip-berkoalisi-dengan-gerindra-ini-keyakinan-ahok>, (diakses tanggal 23 Mei 2016).

Media Indonesia, 14 Oktober 2013.

Muhtadi, Burhanuddin, *Dinasti politik, Korupsi, dan Demokrasi*, dalam *Media Indonesia*, 14 Oktober 2013.

Pilkada Serentak, *Dinasti Atut Kuasai Banten*, dalam <https://m.tempo.co/read/news/2015/12/10/304726489/pilkada-serentak-dinasti-atut-masih-kuasai-banten> (diakses 31 Mei 2016).

Pratama, Heroik M, dan Maharddika, Prospek Pemerintahan Hasil Pilkada Serentak 2015, dalam <http://www.rumahpemilu.org/in/read/11153/PROSPEK-PEMERINTAHAN-Hasil-Pilkada-Serentak-2015->, (diakses tanggal 23 Mei 2016).

Putu Setia, Cari Angin: Jegal, dalam Koran Tempo 11-12 Juni 2016.

Raharjo Jati, Wasisto, Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal, dalam Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 18, No. 2, Juli 2013.

Rusmadi, Faisal, Pola Politik Kekerabatan sebagai Faktor Terbentuknya Dinasti Politik, dalam [http://www.academia.edu/18974427/pola\\_politik\\_kekerabatan\\_sebagai\\_faktor\\_terbentuknya\\_dinasti\\_politik](http://www.academia.edu/18974427/pola_politik_kekerabatan_sebagai_faktor_terbentuknya_dinasti_politik), (diakses 30 Mei 2016).

Teman Ahok Gugat Aturan Pilkada, dalam Koran Tempo, 18-19 Juni 2016.

Tiga Dinasti Ratu Atut Bertarung di Pilkada Serentak dalam [http://www.beritajatim.com/politik\\_pemerintahan/244455/tiga\\_dinasti\\_ratu\\_atut\\_bertarung\\_di\\_pilkada\\_serentak.html](http://www.beritajatim.com/politik_pemerintahan/244455/tiga_dinasti_ratu_atut_bertarung_di_pilkada_serentak.html) (diakses 31 Mei 2016).

Tribun Jateng, Partai Golkar Beri Sinyal Dukung Ahok, dalam <http://jateng.tribunnews.com/2016/05/21/partai-golkar-beri-sinyal-dukung-ahok>, (diakses tanggal 23 Mei 2016).